

## LAPORAN

### KUNJUNGAN BELAJAR KE KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012

#### I. Pendahuluan

YTS mendampingi pemerintah kabupaten Gunung Mas (Gumas) dan mitra dari enam (6) desa percontohan melakukan kunjungan belajar ke Kabupaten Tuban pada tanggal 11 April 2012 sampai dengan 13 April 2012. Kunjungan ini merupakan bagian dari penguatan kapasitas YTS terhadap mitra-mitranya di dalam proyek peningkatan kualitas *governance* di Gumas.

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Tuban terletak di tepi pantai Pulau Jawa di sebelah utara. Penduduknya berjumlah 1 juta orang. Beberapa tahun terakhir ini, Kabupaten Tuban dikenal di Indonesia sebagai salah satu kabupaten yang berprestasi dalam menjalankan desentralisasi fiskal ke desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan pengembangan ekonomi lokal desa. Tahun ini (2012) Pemerintah Tuban mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memberikan predikat tersebut kepada Pemkab Tuban berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran 2011<sup>1</sup>. Predikat ini merupakan prestasi terbaik dari kinerja APBD sebuah kota dan kabupaten.

Merujuk pada hal di atas, YTS dan mitra dari Kabupaten Gunung Mas ingin belajar lebih banyak tentang keberhasilan kabupaten Tuban dalam menjalankan kebijakan ADD dan pengelolaan aset desa sebagai bagian dari kebijakan pengembangan ekonomi lokal.

Peserta kunjungan ini cukup besar yang terdiri dari: 12 orang desa (unsur pemerintah desa dan kader desa); 2 orang camat (Camat Kahayan Utara dan Camat Damang Batu); 3 orang dari SKPD (BPMPD-KB 2 orang dan Dinas Pternakan dan Perikanan 1 orang); dan Staf YTS sebanyak 9 orang (5 PO, 1 Manajemen, PC<sup>2</sup>, staf Media dan Staf Pelatihan).

#### II. Proses Pelaksanaan

Kunjungan ini memiliki agenda yang padat. Kegiatan ini dimulai dengan briefing pada hari kedatangan. Pada hari kedua yang mana merupakan kegiatan inti kunjungan dimulai dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 20.00 Wib. Pada hari ketiga, peserta melakukan perjalanan pulang ke Palangkaraya dan Gumas.

Kunjungan di bagi menjadi tiga tim yaitu: tim yang berkunjung ke Bappeda Kabupaten Tuban terdiri dari: PC, Staf Media, BPMPD-KB Gumas. Tim kedua berkunjung ke Desa Sugihan yang terdiri dari 6 orang desa, 2 orang PO, staf Pelatihan YTS, Staf Dinas Pternakan dan Perikanan serta Camat Kahayan Utara. Tim ketiga berkunjung ke Desa

---

<sup>1</sup> Tuban.com

<sup>2</sup> Project Coordinator

Klotok yang terdiri dari 6 orang desa, 3 orang PO, Asisten Manajemen YTS, dan Camat Damang Batu. Peserta beristirahat setelah kembali dari kunjungan lapangan. Menjelang makan malam peserta berkumpul untuk mendiskusikan hasil kunjungan dan berbagi pembelajaran.

Tim pertama yang berkunjung ke Bappeda diterima oleh Kepala Bappeda dan beberapa Kepala Bidang dan Staf. Selain itu hadir pula perwakilan dari BPMD. Kepala Bappeda mempresentasikan aspek-aspek kebijakan ADD di Kabupaten Tuban dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Acara diakhiri dengan bertukar cinderamata antara Bappeda Tuban dengan YTS. Setelah acara selesai di Bappeda, delegasi Gumas dan YTS mengunjungi BPMD Kabupaten Tuban untuk melihat beberapa contoh dokumen proposal ADD dan dokumen pelaporan ADD.

Tim kedua yang berkunjung ke Desa Sugihan diterima oleh 5 orang yaitu: Bapak Warsito, SE (Kepala Desa) yang mempresentasikan Dana Alokasi Desa, Bapak Drs. H. Turji yang mempresentasikan Pendapatan Asli Desa, Bapak Sumarno yang menceritakan aset desa berupa tanah desa, swadaya masyarakat dll, Ibu Siti Sasmiati menceritakan kegiatan gotong royong, infrastruktur dll, Ibu Nurpakis (idem ibu Siti). Diskusi berjalan cukup interaktif. Peserta merasa informasi yang diperoleh sangat berguna dan cukup inspiratif.

Tim ketiga yang berkunjung ke Desa Klotok diterima oleh 7 orang yaitu: Bapak Ir. Suprayitno, MP (Kepala Desa) presentasi tentang HIPPA (Himpunan Petani Pengguna Air), Bapak Agus Hanafi bercerita tentang kegiatan usaha tambat perahu, Bapak Kusyanto bercerita tentang usaha pasar desa, Bapak purwanto bercerita tentang usaha lumbung desa, Bapak Subakir bercerita tentang HIPPA, Bapak Hali Safaat bercerita tentang aset desa dan Bapak Imam Safi'i bercerita tentang pertanian. Peserta kunjungan sangat kagum dengan inovasi dan keberhasilan yang dicapai oleh Desa Klotok. Peserta sangat ingin meniru keberhasilan Desa Klotok.

### III. Analisis dan Kesimpulan

#### - Kunjungan ke Bappeda Tuban

Berdasarkan catatan dan analisis staf BPMPD-KB beberapa aspek penting yang perlu diketahui:

No.	Aspek Pemanding	Kab. Tuban	Kab. Gunung Mas
1.	Besaran ADD sesuai PP No. 72/2005	Rp. 17.380.000.000 untuk 311 desa atau 10% dari DAU <sup>3</sup> kabupaten (tidak termasuk gaji aparatur Pemdes)	Rp. 8.850.000.000 untuk 115 desa atau 2% dari DAU kabupaten (digunakan habis untuk gaji dan operasional pemerintah)

<sup>3</sup> Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat

			desa)
2.	Penggunaan ADD	30% operasional Pemdes dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat	27% operasional pemdes dan 73% gaji perangkat desa termasuk BPD
3.	Mekanisme Penyaluran	ADD dimasukkan pada DPA DPKAD <sup>4</sup>	ADD dimasukkan pada DPA DPKAD
4.	Tahapan Penyaluran	Tahap pertama Januari-Maret, tahap selanjutnya tergantung pada pelunasan PBB	Tahap I: 35% (Jan-Maret) Tahap II: 45% (April-Sep) Tahap III: 20% (Okt-Des)
5.	Tahap Pelaksanaan	Menyesuaikan Perencanaan APBDesa	Menyesuaikan Perencanaan APBDesa
6.	Tahap Pengendalian	Dilakukan oleh tim koordinasi pengendalian ADD serta masyarakat melalui BPD	Dilakukan oleh tim koordinasi pengendalian ADD serta masyarakat melalui BPD
7.	Tahap Pelaporan	Laporan pengelolaan ADD sesuai tahapan pencairan dan laporan akhir pengelolaan ADD. Laporan ini dituangkan dalam LPPD dan LPKJ akhir tahun.	Laporan pengelolaan ADD sesuai tahapan pencairan dan laporan akhir pengelolaan ADD. Laporan ini dituangkan dalam LPPD <sup>5</sup> dan LKPJ <sup>6</sup>

Merujuk pada hasil catatan staf BPMPD-KB di atas, PC melihat ada beberapa aspek yang penting sebagai bahan analisis lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Kabupaten Tuban dan Kabupaten Gunung Mas keduanya menjalankan PP No. 72 tahun 2005 namun ada yang membedakan secara mendasar dalam pelaksanaannya seperti:
  - Besaran alokasi ADD sebanyak 10% dari total DAU sesuai amanat peraturan pemerintah tentu harus dicapai. Namun, urgensi realisasi ADD tidak semata-mata di alokasi tetapi bagaimana pemerintah daerah konsisten memastikan ADD dijalankan sebagai sistem desentralisasi fiskal ke desa untuk menunjang operasional pemerintah desa dan untuk pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuannya. Fakta bahwa di Gumus, sistem ini belum berjalan<sup>7</sup> karena seluruh dana digunakan untuk gaji pemerintah desa, perjalanan dinas kepala desa dan hanya sekitar 3% rata-rata untuk operasional desa. Kondisi ini terjadi karena dua sebab yaitu: (1). Pemerintahan desa tidak memiliki gaji; dan (2). *Moral hazard* sebagian kepala desa.

<sup>4</sup> Daftar Prioritas Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

<sup>5</sup> Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

<sup>6</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

<sup>7</sup> Sesuai uji petik yang dilakukan pemda Gumus tahun 2010-2011

- Kondisi di atas, berimplikasi luas dan berantai seperti: (1). Tidak ada transparansi atas informasi ADD pada masyarakat, tidak ada proses konsultasi penggunaan ADD pada masyarakat karena alokasi pemberdayaan masyarakat dialihkan untuk gaji perangkat desa; (2). BPD yang seharusnya berfungsi mengontrol kinerja pemerintah desa tidak berjalan karena BPD juga ikut menikmati dana ADD untuk gaji ketua dan anggotanya; (3). Pada umumnya, tidak ada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sesuai amanat Undang-Undang tentang Desa<sup>8</sup>.
2. Merujuk pada kondisi di atas, Pemerintah Gumas belum bisa mengambil tindakan tegas dengan beberapa pertimbangan seperti:

- Pemerintah Kabupaten belum mengalokasikan dana khusus untuk tunjangan gaji aparat pemerintah desa;
- Pemda Gumas tidak mengkehendaki ada satupun kepala desa yang harus masuk penjara karena praktek di atas, sebelum pemerintah kabupaten menyediakan sistem pendukung untuk pelaksanaan ADD ini dengan benar. Pemerintah mengakui bahwa sumberdaya manusia dari pemerintah desa yang pada umumnya lemah masih harus ditingkatkan. Selain itu, secara politis penegakan hukum dan sanksi administratif yang tegas pada para kepala desa yang tidak mematuhi aturan akan berdampak pada banyaknya desa yang tidak memiliki kepala desa karena tidak ada yang mau mencalonkan atau dicalonkan. Jika hal itu terjadi, maka akan terjadi kekosongan kekuasaan dan terhentinya pembangunan di desa.

- Kunjungan ke Desa Sugihan

Desa Sugihan terletak di Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. Desa ini berpenduduk lebih dari 732 KK dengan mata pencaharian utama pertanian. Desa Sugihan merupakan salah satu desa yang paling berprestasi dalam pengelolaan ADD di Kabupaten Tuban. Beberapa informasi yang berhasil dikumpulkan delegasi Gumas dan YTS sbb:

- Mengenai proses persiapan menuju revitalisasi ADD (*bagaimana dari kondisi awal menuju perubahan yang lebih baik*)

Ketika Pemda Tuban menurunkan kebijakan ini ke desa, pemerintah desa menindaklanjuti sesuai dengan prinsip-prinsip pemandu yaitu prinsip partisipasi dan transparansi. Kabupaten Tuban sejak awal kebijakan ADD ini diluncurkan telah

---

<sup>8</sup> Hasil pemantauan BPMPD-KB dan pengakuan di 6 desa pilot project.

bekerjasama dengan LSM Nasional Fitra Jawa Timur. Fitra juga mendampingi desa Sugihan sebagai salah satu desa binaan. Oleh sebab itu, secara sumberdaya manusia pemerintah Desa Sugihan cukup siap. Disamping itu, komitmen yang kuat dari Kepala Desa dan BPD sebagai mitra memuluskan jalan pelaksanaan ADD ini.

- Mengenai implementasi awal revitalisasi ADD

Masyarakat menyambut baik adanya kebijakan ADD di Desa Sugihan. Alokasi 70% dari ADD untuk pemberdayaan masyarakat menjadi stimulant untuk memperbanyak kegiatan di desa khususnya biaya operasional lembaga-lembaga kemasyarakatan desa seperti contoh tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rincian Alokasi Dana Desa Desa Sugihan

NO	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa = 30 %</b>	
	- Biaya operasional Pem. Desa	12.730.000
	- Bantuan opearsonal BPD (7 org)	1.970.000
	Sub. Jumlah	<b>14.700.000</b>
2.	<b>Pemberdayaan Masyrakat Desa = 70 %</b>	
	a. Menunjang keg. lembaga kemasy :	
	- Karang Taruna	1.000.000
	- Posyandu	1.400.000
	- PKK	1.500.000
	- LPMD	1.500.000
	b. Pembangunan sarana & prasana :	
	- Penerangan jalan umum desa	3.600.000
	- Pembangunan Paving stone	25.300.000
	Sub Jumlah	<b>34.300.000</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>49.000.000</b>

- Hasil dan Dampak dari Revitalisasi ADD saat ini
  1. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa karena melibatkan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ADD;
  2. Menambah penghasilan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur desa. Hal ini dengan menggunakan tenaga kerja dan material lokal (kecuali tidak ada di desa);
  3. Pengetahuan dan kreatifitas masyarakat tumbuh melalui pertemuan-pertemuan rutin lembaga kemasyarakata desa (PKK, Karang Taruna, Koperasi Wanita, Kelompok Tani dsb).
  
- Rencana-rencana Desa Sugihan untuk implementasi ADD ke depan  
Setiap tahun alokasi ADD untuk perbaikan infrastruktur lingkungan terus dilakukan. Dengan demikian setiap tahun ada jalan lingkungan baru seperti gang yang akan dibuat atau diperbaiki. Selain itu kaderisasi para pengurus lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa agar bisa mengelola dana ADD dengan baik dan akuntabel.
  
- Pembelajaran yang didapat dari Desa Sugihan
  - Bagaimana proses persiapan pengelolaan ADD agar berhasil ?
    1. Pemerintah memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi seperti RPJMDesa, APBDesa dan RKP serta proposal ADD.
    2. Penyusunan proposal ADD melalui proses konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam pertemuan warga di desa. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan pengelolaan ADD.
  
  - Kemampuan apa saja yang perlu dimiliki agar ADD di enam (6) desa pilot project bisa dilaksanakan ?
    1. Kepala Desa memiliki visi yang kuat tentang pembangunan desa.
    2. Kepala Desa jujur, tegas dan transparan.
    3. Kepala Desa mengembangkan kerjasama dengan seluruh kelembagaan desa dan masyarakat.
    4. Dukungan dari RT, RW, PKK dan lain-lain dalam mensukseskan program di masyarakat.
  
  - Bagaimana peran serta pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam mensukseskan agenda revitalisasi ADD ?

1. Peran pemerintah desa adalah menyiapkan semua persyaratan pencairan ADD, memfasilitasi partisipasi masyarakat dan bekerjasama dengan lembaga desa lainnya.
2. Peran BPD memberikan masukan pada proposal ADD. Selain itu BPD juga berperan dalam memonitor dan mengontrol pengelolaan ADD.
3. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan kegiatan, swadaya untuk mendukung kegiatan seperti, uang, tenaga, tanah atau material lainnya.

#### Analisis dan kesimpulan

Merujuk pada penjelasan di atas, maka ada tiga kunci utama dari keberhasilan pengelolaan ADD yaitu: perencanaan partisipatif, kelengkapan administrasi sebagai syarat pencairan ADD serta kemampuan mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel. Sehingga, ADD meskipun jumlahnya tidak besar seperti di Desa Sugihan namun bisa memberi manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Enam (6) desa pilot project kita bisa mereplikasi keberhasilan Desa Sugihan jika tiga kunci sukses di atas dijalankan. Adapaun kendala –kendala yang masih dihadapi menjadi alat advokasi untuk meningkatkan kapasitas teknis dan dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten.

#### - Kunjungan ke Desa Klotok

Desa Klotok terletak di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Penduduk Desa Klotok memiliki mata pencaharian utama pertanian. Desa Klotok merupakan salah satu desa yang paling berprestasi dalam mengembangkan ekonomi lokal. Keberhasilan itu berkontribusi sangat signifikan terhadap pendapatan desa di Kabupaten Tuban. Beberapa informasi yang berhasil dikumpulkan delegasi Gumas dan YTS sbb:

- Mengenai proses persiapan menuju revitalisasi Aset Desa (AD) - (*bagaimana dari kondisi awal menuju perubahan yang lebih baik*)

Klotok berada di aliran sungai Bengawan Solo. Desa Klotok merupakan wilayah rawan banjir. Pada era Regim Soeharto, Desa Klotok menjadi salah satu desa termiskin di Indonesia. Masyarakat Desa klotok pada umumnya pekerja keras dan mau bergotong royong. Hal itu menjadi modal awal Desa Klotok bangkit dari kemiskinan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan aparatnya member contoh keterbukaan baik dalam mengelola kelembagaan desa maupun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Selain itu, Pemerintah Desa

selalu melakukan pertanggungjawaban baik pada pengurus sendiri maupun kepada masyarakat.

- Mengenai implementasi awal revitalisasi aset desa/kemandirian desa

Pada era reformasi khususnya ketika kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dikucurkan, Desa Klotok menggunakan dana tersebut sebagian untuk penyertaan modal desa. Desa Klotok juga menciptakan sumber-sumber pendapatan desa yang dikelola sebagai Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sejak tahun 2005, seperti:

1. Membentuk organisasi Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA)

Desa Klotok sebagai desa yang penduduknya sangat banyak yang miskin sebenarnya memiliki tanah yang subur. Namun karena pertaniannya menggunakan sistem tadah hujan maka hanya bisa panen satu kali dalam satu tahun. Melalui inisiatif Kepala Desa dan juga tokoh agama (Kiyai), potensi Sungai Bengawan Solo mulai dimanfaatkan dengan melakukan penyedotan menggunakan mesin diesel. Dengan cara itu, petani dapat melakukan panen tiga kali dalam satu tahun. Kemudian datang pengusaha bekerjasama dengan pemerintah desa membuat demplot pertanian dan menyediakan pinjaman modal untuk petani secara individu. Maka dari situ dibentuklah Himpunan Petani Pengguna Air. Pemerintah desa sejak tahun 2005 telah mengeluarkan 93 peraturan desa untuk keperluan pengelolaan HIPPA. HIPPA menjadi sumber pendapatan desa terbesar yaitu sekitar Rp. 602.500.000/tahun.

Kontribusi HIPPA pada desa dengan cara iuran dari petani sebanyak 12% dari hasil panen ketika musim hujan dan 14% dari hasil panen pada musim kemarau. Iuran dipungut dalam bentuk gabah. Penanaman dilakukan serempak melalui perencanaan yang matang agar tahu kapan air Sungai Bengawan Solo itu naik atau turun. Setiap panen pengurus HIPPA melakukan laporan pertanggungjawaban berdasarkan hasil panen masing-masing anggota dan iuran yang berhasil dikumpulkan. Sebagai ilustrasi, setiap 1 Hektar, petani mendapatkan 10 ton. Rap Luas lahan yang digarap oleh para petani anggota HIPPA adalah 600 Hektar. HIPPA memiliki struktur pengurus untuk melayani petani (bibit, peralatan, irigasi, penjualan hasil panen, simpan pinjam dll) dan struktur pengawas untuk mengawasi kegiatan sejak penanaman sampai dengan panen (ada pos penjaga/pengawas di tiga tempat).

Aset-aset desa yang dikelola HIPPA diantaranya: 2 mobil Pick Up, Tangking 4000 dan 5000, Diesel imbalan 22 buah (12 pk – 16 pk), gudang penampungan gabah dari petani, pos pengawasan.

2. Pasar Desa

Retribusi dari tata niaga pasar desa termasuk parker sebesar Rp. 20.000.000/tahun.

3. Tanah Desa

Ada 3 jenis tanah milik desa yaitu: tanah Bengkok, tanah Celengan dan tanah Sugor Dayong. Ketiga jenis tanah ini disewakan pada warga desa melalui sistem lelang. Panitia lelang dari desa akan mengumumkan kegiatan lelang, satu minggu sebelumnya. Panitia lelang akan menentukan harga dasar. Kemudian

pemenang lelang akan menyetor 10% uang muka dari harga lelang. Jika dalam jangka waktu 1 bulan tidak dilunasi maka uang muka dianggap hangus. Tanah kemudian akan dilelang lagi pada penawar yang lain.

PAD yang dihasilkan dari lelang tanah kas desa sebesar Rp. 150.000.000 dan hasil lelang tanah Bengkok sebesar Rp. 218.250.000. Total pendapatan dari hasil lelang tanah sebesar Rp. 368.250.000.

4. Penggilingan Padi & lumbung desa  
Setiap tahun rata-rata diperoleh sebesar Rp. 4.000.000.
  5. Penyebrangan Sungai  
Pengelolaan dilakukan melalui sistem lelang setiap tahun pada warga desa. Pengelola harus menyetor kepada desa sebesar Rp. 17 jt/tahun. Ongkos jalan Rp.1000.
  6. Retribusi jalan untuk kendaraan muatan/kendaraan proyek  
Setiap tahun rata-rata diperoleh sebesar Rp. 7.500.000 dengan biaya retribusi sebesar Rp. 1000 setiap keluar masuk desa.
- Hasil dan Dampak dari Revitalisasi Aset Desa saat ini

Pada tahun 2007, APBDesa Klotok sudah mencapai Rp. 1070.000.000. ADD yang diterima sebesar Rp. 150.000.000. Itu artinya pendapatan asli desa mereka sudah mencapai Rp. 900.000.000. Dengan pendapatan sebesar itu mereka bisa memberikan beasiswa pendidikan pada anak-anak di desa, mengerjakan sendiri pembangunan infrastruktur di desa, Bahkan, Desa Klotok sudah bisa membayar gaji sendiri Kepala Desanya sebesar Rp. 5000.000. Setiap dusun memiliki kantor sendiri. Desa Klotok sudah tidak memiliki warga miskin lagi. Semuanya sudah masuk kategori sejahtera.

- Rencana-rencana Desa Klotok untuk pengelolaan Aset Desa ke depan

Desa Klotok akan mempertahankan keberhasilan yang sudah dicapai. Untuk keberlanjutannya, Pemerintah Desa bersama masyarakat akan terus melakukan kaderisasi para pengurus kelompok usaha desa dan kerjasama antara kelompok warga di desa.

- Pembelajaran yang diterima dari Desa Klotok

➤ Bagaimana proses persiapan pengelolaan aset desa agar berhasil ?

- ✓ Data atau profil desa sangat penting. Hal ini termasuk data aset desa.
- ✓ Ada kegiatan perencanaan partisipatif yang dilakukan pemerintahan desa dengan masyarakat untuk merumuskan kegiatan-kegiatan untuk mengelola aset desa.

- ✓ Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat.
  - ✓ Adanya transparansi dan akuntabilitas dari pengelola usaha desa dan pemerintah desa.
  - ✓ Adanya penegakan aturan dan hukum. Jadi sejak awal semua pihak sudah tahu bahwa peluang korupsi atau penyelewengan akan ditindak tegas.
- Kemampuan apa saja yang perlu dimiliki agar pengelolaan aset desa di enam (6) desa pilot project bisa dilaksanakan ?

Kepala Desa harus punya visi pembangunan yang jelas dan komitmen yang kuat sehingga bisa memotivasi perangkat desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat.

Ruang untuk inovasi selalu dibuka dengan memperhatikan potensi-potensi yang sudah ada di desa baik bersifat internal desa maupun memanfaatkan kerjasama dengan pihak luar desa seperti YTS dsb.

Kepala desa, staf desa, pengurus lembaga desa seperti BPD dll harus ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Contoh: administrasi, regulasi/aturan main dan pembagian tugas dan peran. Selain itu mereka juga harus rajin berdiskusi dan mencari informasi untuk memperluas wawasan.

- Bagaimana peran serta pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam mensukseskan agenda revitalisasi ADD ?
1. Peran pemerintah desa adalah memfasilitasi akses untuk modal seperti skema kredit melalui program pemerintah (PNPM, PKK, Dinas Koperasi dsb). Hal ini termasuk penyertaan modal dari ADD, pendataan aset desa secara berkala, mengidentifikasi peluang usaha bersama-sama dengan warga dalam berbagai kesempatan diskusi publik di desa, menyiapkan peraturan desa terkait pengembangan usaha desa bersama-sama dengan BPD, menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat meningkat dan mau mendukung berbagai kebijakan pemerintah desa.
  2. Peran BPD adalah mengawasi kinerja pemerintahan desa, bersama-sama dengan pemerintah desa membuat peraturan desa, mendukung pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain

itu BPD juga melakukan penilaian kinerja pemerintah desa melalui rapat pembahasan LPJ kepala desa.

3. Peran masyarakat adalah berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa, kegiatan gotong royong dan swadaya masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Swadaya bisa berupa uang maupun material.

#### Analisis dan Kesimpulan

Keberhasilan Desa Klotok dalam mengelola aset mengajak kita untuk memahami lebih dalam apa yang dimaksud dengan “aset” dan apa saja bentuk “aset” yang bisa dijadikan alat pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep pembangunan berbasis aset dikenal lima jenis aset atau biasa disebut pentagonal aset yaitu: uang, sumberdaya manusia terkait dengan pengetahuan dan keahlian, sumberdaya alam, modal sosial seperti kemauan bergotong royong, kepemimpinan, keterbukaan dsb, serta modal budaya merujuk pada adat kebiasaan dan tradisi/nilai-nilai luhur dsb. Belajar dari Desa Klotok, semua aspek pentagonal aset telah dikelola khususnya kreatifitas, kepemimpinan yang kuat serta kerja keras dari masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan.

Pada aspek kreatifitas, Desa klotok mengoptimalkan sumberdaya alam dengan modal sosial seperti berjangkaran kerja dengan pengusaha, mendapat pendampingan dari FITRA Jawa Timur untuk penguatan kelembagaan desa yang berkontribusi pada meningkatnya kapasitas pemerintah desa.

Pada aspek kepemimpinan yang kuat, tradisi “*berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*” menjadi mantra ampuh dikaitkan dengan modal sosial yang di dorong oleh kepala desa dan pemuka agama. Hal ini berdampak pada perubahan yang sangat baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa Klotok termasuk aparat desanya.

Pada aspek kerja keras masyarakat desa, keinginan untuk membuat perubahan dari miskin menjadi sejahtera merupakan modal awal untuk menggerakkan aset-aset lainnya di desa. Di dorong oleh kepemimpinan yang kuat seperti disebut di atas, kerja keras masyarakat terorganisir dengan sangat baik.

#### IV. Rekomendasi

Baik peserta kunjungan ke Pemda, Desa Sugihan maupun Desa Klotok memiliki sejumlah kesamaan dalam rekomendasinya meliputi:

1. Kepala Desa harus memiliki visi pembangunan yang kuat. Dengan demikian dia bisa menggerakkan aparat desa dan kelembagaan desa lainnya termasuk para tokoh di desa untuk membangun desa. Oleh sebab itu penguatan pengetahuan dan kapasitas pemeritahan desa sangat mendesak.

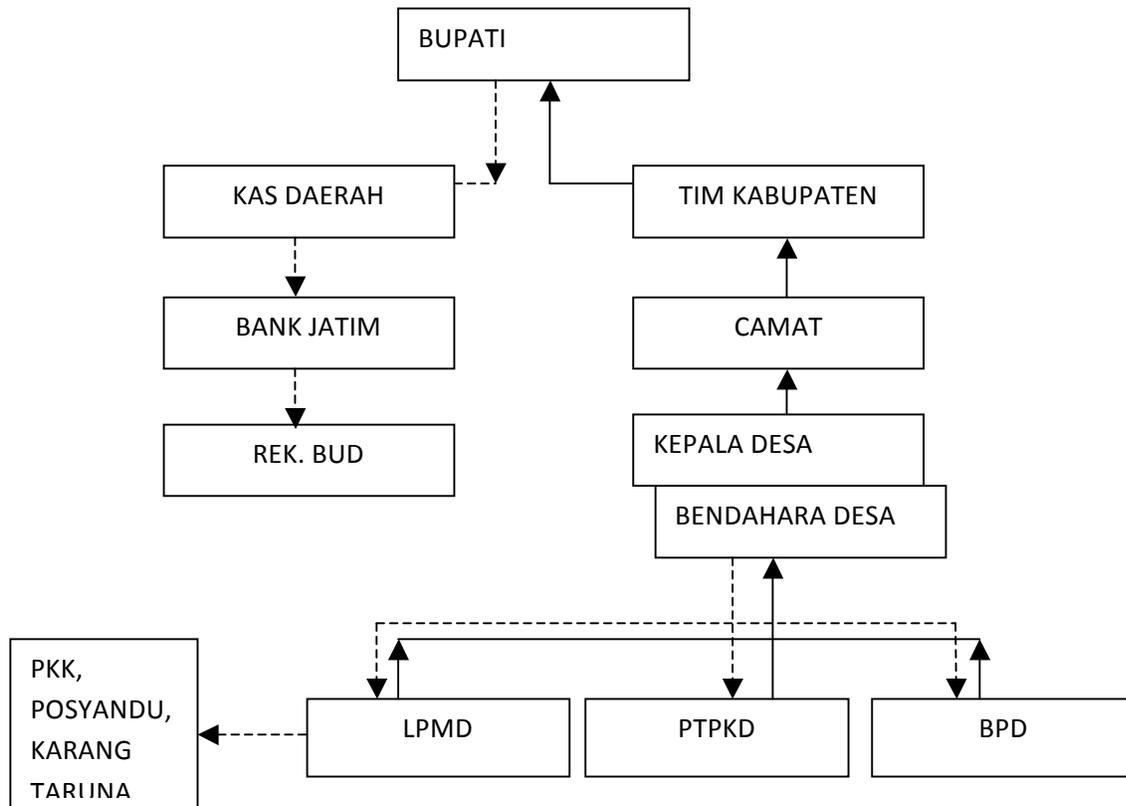
2. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat. Agar hal itu terjadi maka pemerintah desa harus mendapatkan kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah desa harus menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Proses transparansi dan akuntabilitas harus dimulai dari tahap perencanaan pembangunan sampai dengan laporan pertanggungjawaban tahunan kepala desa.
3. Kerjasama antara lembaga desa dan organisasi masyarakat menjadi faktor pendukung lancarnya penyelenggaraan kegiatan pembangunan di desa.
4. Khusus ADD, pemerintah daerah harus memberi alokasi untuk honor kepala desa dan perangkat desa sehingga ADD bisa digunakan sesuai peruntukannya. Pada aspek pengelolaan dan pengawasan, perlu dibenahi mekanisme pencairan, struktur pengawasan dan peningkatan kapasitas pemerintah desa untuk bisa memenuhi persyaratan pencairan ADD.
5. Khusus pengelolaan aset desa, pemerintah kabupaten perlu membenahi administrasi kependudukan dan kepemilikan tanah sehingga pemerintah desa bisa mendapat bagi hasil 10% dari total PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebagai salah satu pendapatan desa. Pemerintah kabupaten bersama-sama kecamatan menyiapkan perangkat kebijakan dan sistem pendukung untuk pembentukan badan usaha milik desa. Jenis-jenis kegiatan yang bisa dikembangkan diantaranya dengan mendukung dibidang pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah bisa bersinergi dengan YTS khususnya pilot project terkait program-program ekonomi tersebut.

## V. Penutup

Gunung Mas memiliki banyak tantangan khusus pada kendala geografis. Namun, Gumas juga memiliki begitu banyak potensi. Fakta bahwa penduduk belum semakin banyak, saat ini adalah waktu yang tepat mulai menggulirkan beberapa terobosan dalam rangka peningkatan kualitas governance di Gumas. Desentralisasi fiskal berupa ADD dan Pagu indikatif kecamatan menjadi salah satu komponen strategis untuk membuat terobosan tersebut. Semoga hasil kunjungan ke Kabupaten Tuban ini bisa direplikasi di Kabupaten Gunung Mas.

Lampiran 1:

## ALUR PENGAJUAN & PENCAIRAN DANA ADD KAB. TUBAN



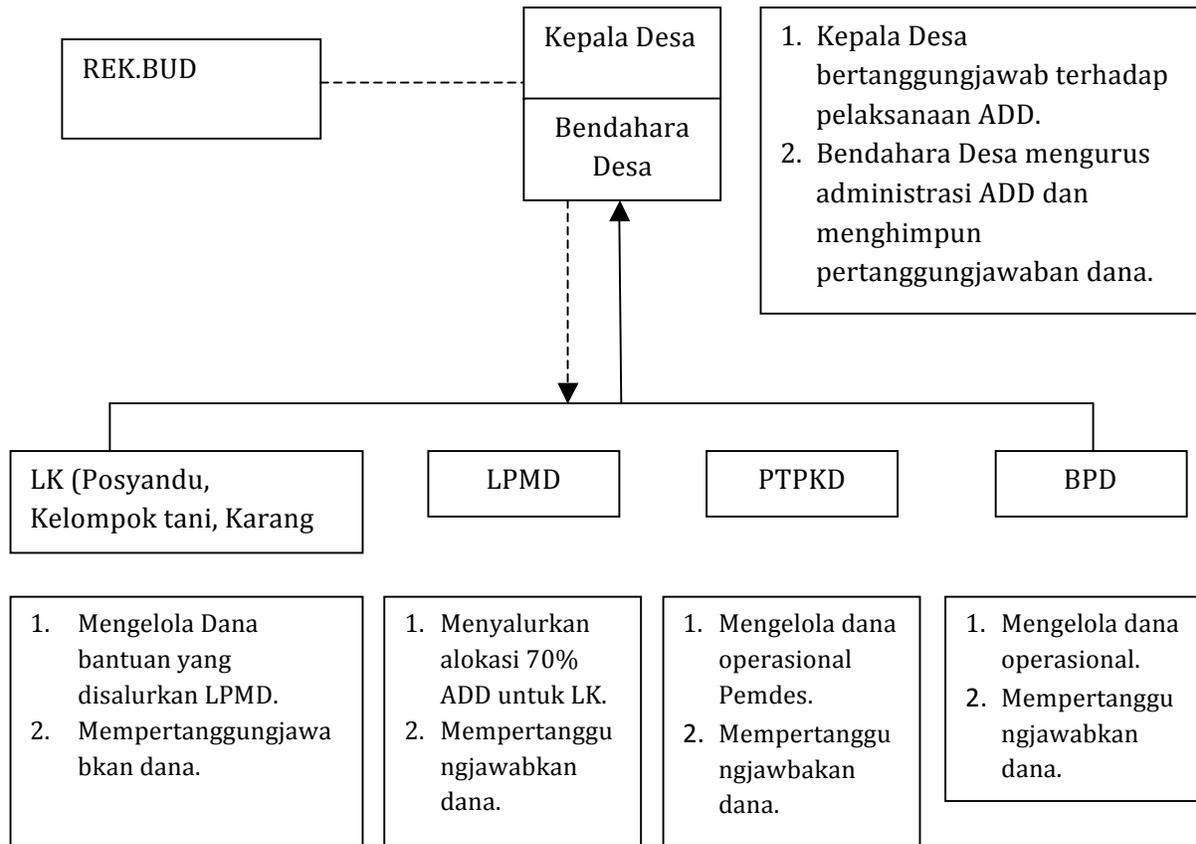
Keterangan:

—————▶ : Pengajuan

- - - - -▶ : Pencairan

Lampiran 2:

## ALUR PENGELOLAAN DANA ADD KAB. TUBAN



Keterangan:

Rek. BUD :

LK : Lembaga Kemasyarakatan

LPMD : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

PTPKD :

BPD : Badan Perwakilan Desa

Lampiran 3:

GALERI FOTO KUNJUNGAN